

**ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KEUANGAN
PEMERINTAH PROPINSI DI PULAU JAWA**

Arthaingan H. Mutiha*

Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

Keywords:

Decentralization Degree Ratios, Regional Financial Independence Ratios and Expenditure Harmonization Ratios, Financial Ratio

Abstract

The purpose of this study is to analyze the comparison of provincial government financial performance in Java and to find out whether there are differences in financial performance among provincial governments. The data used in this study is secondary data for five provinces in Java Island namely Banten, West Java, Central Java, DI Yogyakarta and East Java. The data used is for the period of 2013 until 2016 and data is taken from the Central Bureau of Statistics. The financial performance indicators used in this study are financial ratios such as Decentralization Degree Ratios, Regional Financial Independence Ratios and Expenditure Harmonization Ratios. The results of this study indicate that the best average financial performance is East Java (1,12) then followed by Central Java (0,96), Banten (0,92), West Java (0,90) and DI Yogyakarta (0,59) Meanwhile, different test results of Kolmogorov Smirnov test showed that there is no significant difference between the financial performance of five provinces in Java.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah provinsi di Jawa dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan antara pemerintah provinsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder untuk lima provinsi di Pulau Jawa yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Data yang digunakan adalah untuk periode 2013 hingga 2016 dan data diambil dari Biro Pusat Statistik. Indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan seperti Rasio Tingkat Desentralisasi, Rasio Independen Keuangan Regional dan Rasio Harmonisasi Belanja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan rata-rata terbaik adalah Jawa Timur (1,12) kemudian diikuti oleh Jawa Tengah (0,96), Banten (0,92), Jawa Barat (0,90) dan DI Yogyakarta (0,59) Sementara itu, hasil tes yang berbeda dari uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan lima provinsi di Jawa.

How to Cite:

Mutiha, Arthaingan H. (2018). *Akuntabilitas Analisis Perbandingan Rasio Keuangan Pemerintah Propinsi di Pulau Jawa*. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13(1), 29-38. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/wahana.013.1.3>

* Corresponding Author.

Arthaingan H. Mutiha (h.mutiha@ui.ac.id)

PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah dimulai dengan diimplementasikannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dengan adanya pemberian otonomi daerah, baik pemerintah propinsi maupun kota/kabupaten memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola daerahnya. Pemerintah daerah harus menjadi lebih mandiri sehingga mampu mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat.

Selain itu, salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 32 tahun 2004 definisi dari desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dimaknai dengan penyerahan dan pengalihan tanggung jawab pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, setiap propinsi mengemban tanggung-jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahnya yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah

pusat bahkan masyarakatnya sendiri.

Dalam otonomi daerah, terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu. APBD dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang dihitung dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Heny dan Yulia Saftiana (2015) yang meneliti mengenai perbandingan indikator kinerja keuangan Pemerintah Propinsi Se- Sumatera Bagian Selatan, dimana kesimpulan dari penelitian tersebut adalah tidak ada perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se Sumatera Bagian

Selatan. Sementara beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Febriansyah (2015) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan sementara Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Amalia dan Purbadharmaja (2014) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan paparan diatas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Rasio Keuangan Pemerintah Propinsi di Pulau Jawa” dimana Pemerintah Propinsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Sementara, rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian Belanja. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2013 – 2016 yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan dan Signalling dalam Pemerintahan

Menurut Jensen *et al* (1976), hubungan keagenan adalah kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) terlibat dengan orang lain

(*agent*) untuk melakukan pelayanan kepada mereka yang melibatkan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agent.

Menurut Zimmerman (1977), *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai *principal* memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Fadzil dan Nyoto (2011) terdapat hubungan prinsipal agen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Ini dikarenakan Indonesia sebagai negara kesatuan pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.

Teori *signalling* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berusaha menunjukkan sinyal kepada masyarakat (Evans dan Patton, 1987). Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang berjalan saat ini sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada masyarakat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai promosi untuk tujuan publik.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2007) bahwa salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah

adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Sementara itu menurut Ulum (2012) bahwa sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial maupun nonfinansial. Menurut Mahmudi (2016) terdapat beberapa analisis rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Dengan kata lain, rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari pihak eksternal.

Rasio Kemandirian dihitung dengan cara perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Bantuan}}$$

Semakin tinggi angka rasio Kemandirian Keuangan Daerah berarti ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin rendah, demikian pula sebaliknya (Mahumudi, 2016).

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Rasio Keserasian Belanja

Menurut Mahmudi (2016), analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Salah satu analisis keserasian belanja adalah analisis belanja langsung dan belanja tidak langsung. Klasifikasi belanja ke dalam belanja langsung dan tidak langsung merupakan klasifikasi berdasarkan aktifitas. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan sementara belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Seharusnya belanja langsung harus lebih besar daripada belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas keluaran suatu kegiatan.

Rasio belanja langsung dan Rasio Belanja Tidak Lagsung dipaparkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}}$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}}$$

OBJEK & METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, populasi dan sampel

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data bersumber dari data asli yang sudah ada dan peneliti hanya mengolah data yang sudah ada untuk mendapatkan hasil dari variabel yang terkait.

Penelitian ini dilakukan pada lima propinsi yang ada di Pulau Jawa yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Variabel kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 indikator yakni Derajat desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian Belanja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari data keuangan lima propinsi dari tahun 2013 hingga tahun 2016 yang diambil dari Buku Statistik Keuangan Daerah bersumber dari website Biro Pusat Statistik.

Operasionalisasi Variabel

Indikator kinerja keuangan dalam penelitian ini diwakili oleh 3 (tiga) rasio keuangan, yaitu Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian Belanja. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Dengan kata lain, rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari pihak eksternal. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara

perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman.

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi sehingga diharapkan pemerintah dapat melayani rakyatnya dengan baik.

Rasio keserasian belanja menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Klasifikasi belanja ke dalam belanja langsung dan tidak langsung merupakan klasifikasi berdasarkan aktifitas. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan sementara belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung sehingga seharusnya belanja langsung harus lebih besar daripada belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas keluaran suatu kegiatan.

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis perbandingan indikator kinerja keuangan lima propinsi di Pulau Jawa yakni Pemerintah Propinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur, dengan menggunakan tiga rasio keuangan yakni derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio keserasian. Selanjutnya akan

dilihat perubahan atau trend kinerja keuangan rata dengan nilai masing-masing sebesar 0,67; 0,65; kelima propinsi tersebut dalam kurun waktu 0,64 dan 0,68 sementara propinsi DI Yogyakarta 2013 – 2016. Melalui tes Kolmogorov Smirnov, memiliki nilai derajat desentralisasi dibawah nilai akan dilihat apakah ada perbedaan kinerja rata-rata yakni sebesar 0,45. Menarik untuk keuangan pada kelima propinsi tersebut, dengan diperhatikan bahwa Propinsi Jawa Barat dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang diantara lima propinsi, tidak membuat propinsi Jawa signifikan pada kinerja keuangan Barat memiliki Nilai Derajat Desentralisasi tertinggi pemerintah lima propinsi di Pulau Jawa.

H_1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah lima propinsi di Pulau Jawa.

Bila nilai *asympt sig* pada hasil pengujian lebih besar dari 0,05 ($>0,05$) maka H_0 diterima, demikian pula sebaliknya, bila nilai *asympt sig* pada hasil pengujian lebih kecil dari 0,05 ($<0,05$) maka H_0 ditolak.

PEMBAHASAN

Derajat Desentralisasi

Nilai derajat desentralisasi tahun 2013-2016 terdapat pada Tabel 1. Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa Propinsi Jawa Timur memiliki Nilai Derajat Desentralisasi paling tinggi diantara lima propinsi secara konsisten dari tahun 2013 hingga 2016, sementara itu, Nilai Derajat Desentralisasi terendah adalah pada propinsi DI Yogyakarta. DI Yogyakarta memiliki Nilai Derajat Desentralisasi terendah diantara lima propinsi dan konsisten dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Selain itu, Rata-rata nilai derajat desentralisasi dari lima propinsi adalah sebesar 0,62. Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur memiliki nilai derajat desentralisasi diatas rata-

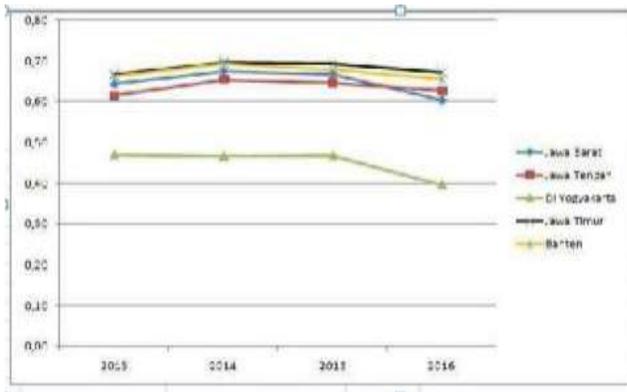
tingkat Realisasi PAD dan Total Pendapatan tertinggi

Tabel 1
Nilai Derajat Desentralisasi Tahun 2013-2016

Derajat Desentralisasi	2013	2014	2015	2016	Rata - rata
Jawa Barat					
Realisasi PAD	12.360.109.670	15.036.153.310	16.032.856.414	16.160.205.552	
Total Pendapatan Daerah	19.537.611.510	22.310.943.031	24.009.580.850	26.806.897.281	
Derajat Desentralisasi	0,64	0,67	0,67	0,60	0,65
Jawa Tengah					
Realisasi PAD	8.212.800.661	9.916.358.231	10.504.825.813	13.810.924.605	
Total Pendapatan Daerah	13.243.358.227	15.157.460.001	16.828.153.595	22.026.201.671	
Derajat Desentralisasi	0,62	0,65	0,65	0,63	0,64
DI Yogyakarta					
Realisasi PAD	1.216.102.750	1.464.604.954	1.553.110.770	1.553.180.869	
Total Pendapatan Daerah	2.583.056.764	3.135.871.880	3.400.614.812	3.921.068.617	
Derajat Desentralisasi	0,47	0,47	0,47	0,40	0,45
Jawa Timur					
Realisasi PAD	11.596.376.615	14.472.216.520	15.402.671.675	15.245.211.800	
Total Pendapatan Daerah	17.372.768.544	20.772.483.874	22.228.450.228	22.663.127.246	
Derajat Desentralisasi	0,67	0,70	0,69	0,67	0,68
Banten					
Realisasi PAD	6.118.551.716	6.896.125.411	6.572.737.619	5.442.329.551	
Total Pendapatan Daerah	6.230.229.814	7.068.432.912	7.328.220.769	8.005.287.474	
Derajat Desentralisasi	0,66	0,69	0,68	0,65	0,67
Rata - rata keseluruhan					0,62

Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2018

Untuk lebih jelasnya, fluktuasi atas nilai derajat desentralisasi dapat dilihat pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2, semua propinsi mengalami kenaikan derajat desentralisasi dari tahun 2013 hingga tahun 2015 dan sama-sama mengalami penurunan di tahun 2016, kecuali provinsi Jawa Timur mengalami penurunan relatif tidak signifikan di tahun 2015.



Gambar 1
Grafik Nilai Derajat Desentralisasi
Tahun 2013-2016

Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2018

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rasio ini dihitung dengan cara perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman. Nilai kemandirian keuangan daerah tahun 2013-2016 terdapat pada Tabel 2 di bawah ini.

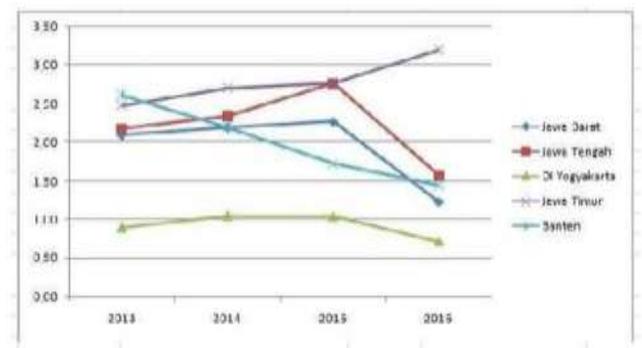
Tabel 2
Nilai Kemandirian Keuangan Daerah Tahun
2013 - 2016

Kemandirian keuangan daerah	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Jawa Barat					
Realisasi PAD	12.360.109.870	15.038.158.330	15.052.856.714	16.183.205.562	
Pembiayaan	5.305.163.390	6.845.777.467	7.058.749.117	13.194.918.221	
Kemandirian keuangan daerah	2,10	2,20	2,27	1,23	1,95
Jawa Tengah					
Realisasi PAD	8.212.800.641	9.915.358.231	10.904.825.813	13.810.924.505	
Pembiayaan	3.772.832.101	4.232.065.030	3.946.579.786	8.752.842.363	
Kemandirian keuangan daerah	2,18	2,34	2,76	1,58	2,27
DI Yogyakarta					
Realisasi PAD	1.216.102.750	1.464.304.954	1.593.110.770	1.553.180.369	
Pembiayaan	1.366.762.510	1.403.336.568	1.532.979.286	2.174.695.260	
Kemandirian keuangan daerah	0,89	1,04	1,04	0,71	0,92
Jawa Timur					
Realisasi PAD	11.596.376.615	14.442.716.520	15.402.647.675	15.745.741.800	
Pembiayaan	4.572.880.152	5.332.123.851	5.555.818.499	4.767.150.721	
Kemandirian keuangan daerah	2,48	2,71	2,77	3,20	2,79
Banten					
Realisasi PAD	4.118.551.716	4.899.125.741	4.972.737.619	5.242.379.551	
Pembiayaan	1.576.818.871	2.229.577.756	2.881.761.794	3.635.817.258	
Kemandirian keuangan daerah	2,61	2,20	1,72	1,44	1,99

Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2018

Rata-rata Kemandirian keuangan daerah dari kelima propinsi ini adalah 1,97. Propinsi yang memiliki rasio kemandirian keuangan daerah diatas 1,97 adalah Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten dengan nilai masing-masing adalah 2,22; 2,79 dan 1,99. Sementara Propinsi Jawa Barat dan DI Yogyakarta memiliki rasio dibawah rata-rata dengan nilai masing-masing 1,95 dan 0,92.

Untuk lebih jelasnya, fluktuasi atas nilai kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.



Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2018

Dari Gambar 2, dapat dilihat bahwa empat propinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Banten mengalami kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2013 hingga tahun 2015 selanjutnya mengalami penurunan rasio pada tahun 2016. Sementara Propinsi Jawa Timur dari tahun 2013 hingga tahun 2016, selalu mengalami kenaikan rasio. Dari kelima propinsi, DI Yogyakarta memiliki rasio Kemandirian Keuangan Daerah terendah dari tahun ke tahun.

Rasio Keserasian

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan aktivitas sehingga

seharusnya proporsi belanja langsung dibandingkan dengan belanja tidak langsung harus lebih besar. Nilai rasio keserasian tahun 2013-2016 terdapat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Nilai Rasio Keserasian Tahun 2013 – 2016

Rasio Keserasian	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Jawa Barat					
Belanja Langsung	3.672.632.315	3.839.172.071	5.161.325.715	6.547.771.714	
Belanja Tidak Langsung	11.724.119.008	16.958.816.394	19.256.280.146	21.755.509.507	
Total Belanja	15.396.745.323	20.797.988.465	24.417.605.861	28.403.281.221	
Rasio Belanja Langsung	0,20	0,18	0,21	0,24	0,21
Rasio Belanja Tdk Langsung	0,80	0,81	0,79	0,76	0,79
Jawa Tengah					
Belanja Langsung	3.511.079.685	4.439.160.853	5.424.695.529	6.386.924.324	
Belanja Tidak Langsung	9.213.696.623	10.645.904.181	12.396.063.966	16.039.277.550	
Total Belanja	12.724.776.308	15.085.065.034	17.820.760.495	22.426.201.874	
Rasio Belanja Langsung	0,28	0,29	0,30	0,28	0,29
Rasio Belanja Tdk Langsung	0,72	0,71	0,70	0,72	0,71
DI Yogyakarta					
Belanja langsung	1.069.781.078	1.420.910.964	1.885.485.375	2.119.075.879	
Belanja Tidak langsung	1.440.467.247	1.561.157.356	1.810.441.177	2.070.916.377	
Total Belanja	2.509.643.375	2.981.068.320	3.696.425.501	4.189.991.396	
Rasio Belanja Langsung	0,41	0,48	0,48	0,51	0,47
Rasio Belanja Tdk Langsung	0,57	0,52	0,52	0,49	0,53
Jawa Timur					
Belanja langsung	9.048.944.119	8.305.212.184	7.871.412.846	7.856.129.443	
Belanja Tidak langsung	10.639.813.108	13.703.106.993	15.074.834.724	15.394.671.504	
Total Belanja	19.738.657.227	22.008.319.177	22.946.307.570	23.050.801.947	
Rasio Belanja Langsung	0,36	0,32	0,34	0,33	0,34
Rasio Belanja Tdk Langsung	0,64	0,68	0,66	0,67	0,66
Banten					
Belanja langsung	1.979.069.495	2.178.547.864	3.325.175.946	3.609.341.541	
Belanja Tidak Langsung	3.316.069.657	4.013.607.703	4.758.963.213	5.201.745.268	
Total Belanja	5.295.139.152	6.192.155.567	8.084.140.159	8.811.086.809	
Rasio Belanja Langsung	0,37	0,35	0,41	0,41	0,39
Rasio Belanja Tdk Langsung	0,63	0,65	0,59	0,59	0,61
					Rata-rata Belanja Langsung 0,34
					Rata-rata Belanja Tidak Langsung 0,66

Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2018

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa realisasi total belanja tertinggi dari tahun 2013 – 2016 adalah pada Propinsi Jawa Barat, sementara total belanja terendah adalah pada Propinsi DI Yogyakarta. Dari tabel 3, dapat dilihat juga bahwa kelima propinsi memiliki rasio belanja langsung lebih kecil dibandingkan rasio belanja tidak langsung. Rata-rata Rasio belanja langsung adalah 0,34, dan dari kelima propinsi yang memiliki rasio belanja langsung dibawah rata-rata adalah Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara DI Yogyakarta, Jawa Timur

dan Banten memiliki nilai rasio diatas nilai rata-rata, masing-masing sebesar 0,47; 0,34; dan 0,39.

Ringkasan Rasio Keuangan Kelima Propinsi Kurun Waktu 2013 - 2016

Ringkasan nilai rata-rata rasio keuangan kelima provinsi lima propinsi yang ada di Pulau Jawa yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur disajikan pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Nilai Rata-rata Rasio Keuangan Tahun 2013 -2016

Propinsi	Desentralisasi	Kemandirian	B. Langsung	B. Tidak Langsung	Rata - rata	Peringkat
Jawa Barat	0,65	1,95	0,21	0,79	0,90	4
Jawa Tengah	0,64	2,22	0,29	0,71	0,96	2
DI Yogyakarta	0,45	0,92	0,47	0,53	0,59	5
Jawa Timur	0,68	2,79	0,34	0,66	1,12	1
Banten	0,67	1,99	0,39	0,61	0,92	3

Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata dari kelima propinsi, yang memiliki kinerja keuangan terbaik adalah Propinsi Jawa Timur, diikuti kemudian oleh Propinsi Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat dan DI Yogyakarta.

Berdasarkan hasil uji beda yang dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test* menunjukkan bahwa secara rerata nilai *Asymp.Sig* adalah sebesar 0,147, (lebih besar daripada 0,05) sehingga H_0 dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan di lima pemerintah propinsi di Pulau Jawa.

Hasil uji beda dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test* disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5
Hasil Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Rerata
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,8980
	Std. Deviation	,19267
Most Extreme Differences	Absolute	,304
	Positive	,174
	Negative	-,304
Test Statistic		,304
Asymp. Sig. (2-tailed)		,147 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rerata	5	,59	1,12	,8980	,19267
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2018

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut Propinsi yang memiliki nilai rata-rata terbaik adalah Propinsi Jawa Timur dengan nilai 1,12. Kemudian di peringkat kedua adalah Propinsi Jawa Tengah dengan nilai 0,96. Di peringkat ketiga adalah Propinsi Banten dengan nilai 0,92. Selanjutnya di peringkat keempat adalah Jawa Barat dengan nilai 0,90 dan peringkat kelima adalah Propinsi DI Yogyakarta dengan nilai 0,59. Sementara itu melalui Uji Beda Kolmogorov Smirnov test, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan di lima propinsi tersebut.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki batasan karena rasio yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 (tiga) rasio yakni Rasio Derajat Desentralisasi, Radio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Keresasian Belanja. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah rasio yang digunakan seperti Rasio Efektifitas PAD, rasio Efektifitas Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Journal Papers

Abdullah & Febriansyah.2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan*. Seminar Nasional Akuntansi.

Amalia, F.R. dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2014. *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keresasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. E- Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 6

Evans, J., & Patton, J., 1987. Signaling and Monitoring in Public Sector Accounting. *Journal of Accounting Research 25 (Supplement)*, 130–158.

Fadzil, F.H., & Nyoto, H., 2011. *Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia*. World Review of Business Research Vol 1 No, 2 pp 51-70.

Jensen, M., dan Meckling, W. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics 3*: 305-360.

Susantih, Heny dan Yulia Saftiana.2014. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Bagian Selatan*. Seminar Nasional Akuntansi.

Zimmerman, J., 1977. *The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives*. *Journal of Accounting Research*, 15: 107-14.

Books

Halim, Abdul, dkk. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah dan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi, 2016. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Ulum, Ihyaul. 2012. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Pemerintah Indonesia.1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta

_____.2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta.

_____. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta

Websites

Badan Pusat Statistik. 2016. Indeks Pembangunan Manusia. <http://www.bps.go.id/menutab.php?>

Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik-keuangan-pemerintah-provinsi 2013-2016. <http://www.bpj.go.id/menutab.php?>